

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 192 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN  
PERUBAHAN PADA UNIT KERJA ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan pada Unit Kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan pada Unit Kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan pada Unit Kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN PADA UNIT KERJA ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Tim yang terdiri dari Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan pada Unit Kerja Eselon II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Narahubung Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. membuat rencana aksi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Eselon II;



- b. menyiapkan dokumen data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Eselon II; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi di Unit Kerja Eselon II.

Agen Perubahan pada Unit Kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja tentang pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
- f. Sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Narahubung Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan Agen Perubahan di Unit Kerja Eselon II.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
NARAHUBUNG REFORMASI  
BIROKRASI PADA UNIT KERJA  
ESELON II DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 192 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 Juli 2019

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI  
PADA UNIT KERJA ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja	Honorarium
1.	Pengarah	Setya Budi Arijanta	Sekretaris Utama	500.000
2.	Ketua	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	450.000
3.	Anggota	Sarah Arlina	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	-
		Setiawan Rahandi Sabri	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	-
		Evi Egyasti	Biro Umum dan Keuangan	-
		Agung Ismail	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	-
		Indra Lesmana	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	-
		Estu Retno Yulianti	Inspektorat	-
		Yoga Nurdani	Pusdiklat	-



		Budi Bowo Laksono	Pusdiklat	-
		Tri Susanto	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	-
		Lailatul Mufarokhah	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	-
		Oktrita Purwantari Rahayu	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	-
		Meylina Putri Fibisari	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	-
		Muhammad Hanif Firnanda	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	-
		Eva Nurdina Agustini	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	-
		Mahfuzan Zakaria	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	-
		Muhamad Saifudin	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	-
		Sri Utaminingsih	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	-
		Mustika Rosalina Putri	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-
		Galuh Arini Sasi Kirono	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	-

		Ade Wahyu Kurniawan	Direktorat Sertifikasi Profesi	-
		Dian Arsita Wardhani	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	-
		Eben Henry Reagen	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	-
		Inamawati Mastuti Dewi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	-

2. AGEN PERUBAHAN PADA UNIT KERJA ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Kerja	Honorarium
1.	Ribut Aji Kasniadi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	300.000
2.	Disty Putri Ratna Indrasari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
3.	Dede Agustina Muhajirin	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
4.	Tri Tarwoco	Inspektorat	300.000
5.	Juniarty Erika Magdalena S	Pusdiklat	300.000
6.	Fenita Enggraini	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000
7.	Tino Yuka Aldila	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
8.	Syukri	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000

9.	Widya Prima Sari Fultanegara	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
10.	Andri Priyo Utomo	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
11.	Mohamad Irvan Faradian	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
12.	Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	300.000
13.	Martdetiara Dewi Kartika	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
14.	Anas Bayu Kusuma	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
15.	Astri Erviana	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
16.	Muhammad Taufikurrohman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO